

SEJARAH KEBERHASILAN ASIAN GAMES IV PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN TAHUN 1962

Ardian Fahri¹

¹ Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Email: 1ardianfahri.2021@student.uny.ac.id

Abstract. This research uses Historical Research Methods through the steps of Heuristics, Criticism, Interpretation, and Historiography. This study aims to know and understand the history of the success of the IV Asian Games in 1962 during the Guided Democracy period. The conclusion of this study is that Guided Democracy began with Presidential Decree No.150 of 1959 which is also known as Presidential Decree of July 5, 1959. The Guided Democracy government had gained success with the success of the IV Asian Games in 1962 which began from May 24 to June 1, 1958. Some of the implementations of government policies during the Guided Democracy period in 1962 in the success of the IV Asian Games are the Facility Provision Policy, Implementation Fund Fulfillment Policy, Policies related to the implementation of Asian Games events. The impact of holding the 1962 Asian Games was very large for the Indonesian nation including the Improvement of International Cooperation and Relations, Indonesia's Increasing Existence and the Growth of National Sports. Through the Asian Games, it has become a new benchmark for the Indonesian nation in the field of Indonesian sports, with the acquisition of double success, namely success as an organizer and success from achievements.

Keyword: Asian Games; Guided Democracy; Sukarno

Abstrak. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Historis melalui langkah-lakngkah yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi . Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami sejarah keberhasilan Asian Games IV Tahun 1962 pada masa Demokrasi Terpimpin. Simpulan dari penelitian ini adalah Demokrasi Terpimpin diawali dengan Keputusan Presiden RI No.150 Tahun 1959 yang disebut juga sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kemunculan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada pemerintahan Demokrasi Terpimpin telah memperoleh keberhasilan dengan susksesnya Asian Games yang ke -IV pada tahun 1962 yang dimulai sejak 24 Mei hingga 1 Juni 1958. Beberapa implementasi kebijakan pemerintah masa Demokrasi Terpimpin tahun 1962 dalam keberhasilan Asian Games IV yaitu Kebijakan Penyediaan Fasilitas, Kebijakan Pemenuhan Dana Pelaksanaan, Kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan acara Asian Games. Dampak penyelengaraan Asian Games 1962 sangatlah besar bagi bangsa Indonesia diantaranya adalah Peningkatan Kerjasama dan Relasi Internasional, Eksistensi Indonesia Semakin Meningkat dan Pertumbuhan Olahraga Nasional. Melalui Asian Games tersebut, telah menjadi sebuah tolak ukur baru bangsa Indonesia dalam bidang olahraga Indonesia, dengan perolehan kesuksesan ganda yakni sukses sebagai penyelenggara dan sukses dari prestasi.

Kata Kunci: Asian Games; Demokrasi Terpimpin; Soekarno



Copyright © 2023 The Author(s)
This is an open-access article under the CC BY-SA license.
[Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](#)

PENDAHULUAN

Indonesia memperoleh kemerdekaan dengan perjuangan yang panjang serta mampu mengukuhkan diri sebagai sebuah Negara melalui kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan yang di dapatkan dengan didukung oleh wilayah, rakyat, pemerintahan berdaulat dan bentuk pengakuanyang berasal dari negara lain, hal ini menyebabkan Indonesia harus terus meningkatkan eksistensinya dalam pergaulan Internasional. Indonesia pada awal kemerdekaan juga masih berproses dalam menjalankan roda pemerintahannya. Menurut Arend (1995:10) segi sejarah memaparkan

bahwa , sistem pemerintahan yang berlaku di masa itu adalah Sistem Pemerintahan Presidensiil hal ini berubah ketika bertepatan dengan 14 November 1945 terjadi peristiwa pergantian kepala pemerintahan dari tangan Soekarno beralih ke Syahrir , oleh sebab itu menunjukan adanya perubahan sistem pemerintahan menjadi Sistem Pemerintahan Parlementer.

Perkembangan sejarah selanjutnya juga menunjukan dinamika perubahan, perubahan di Indonesia tersebut terjadi pada 1959 sampai dengan 1966 dengan adanya penerapan Demokrasi Terpimpin. Pelaksanaan demokrasi ini dilakukan setelah terjadi Demokrasi Parlementer. Menurut Ilmar (2018:9) menyatakan bahwa menurut pendangan Soekarno dalam pelaksanaan demokrasi liberal tidaklah sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita rakyat yang berkeadilan dan makmur. Demokrasi yang seharusnya sesuai dan sejalan dengan cita-cita tersebut ialah Sosio-Demokrasi, oleh sebab itu maka dirinya melakukan perumusan Demokrasi Terpimpin dengan tujuan untuk mewujudkan apa yang menjadi konsep sosio-demokrasi pada kondisi Indonesia saat itu.

Penerapan Demokrasi parlementer yang dilakukan saat itu lebih mengarah pada suatu paham yakni Paham Liberal, hal ini kurang cocok sebab Indonesia lebih mengarakan kedalam sikap gotong royong. Hal ini sejalan dengan (Rusadi, 1977: 193) yang menyatakan bahwa sistem parlementer yang mulai diberlakukan bersama UUDS 1950, hal ini kurang cocok dengan kepribadian dari bangsa ini. Kurangnya kecocokan Sistem Parlementer dengan kepribadian bangsa dapat dilihat dari beberapa peristiwa seperti kabinet-kabinet yang silih berganti. Hal ini menunjukan bahwa apa yang dirancang dan menjadi program-program kabinet-kabinet itu belumlah dapat terealisasikan secara maksimal.

Bagi Soekarno, Demokrasi dalam bentuk Parlementer yang diterapkan di Indonesia dianggap sebagai produk impor, produk ini memiliki nilai-nilai yang dianggap kurang sejalan dengan nilai keadilan social dan jiwa serta cita-cita Indoneisa (Soegiarso, 1988: 127). Pemberlakuan Dekrit Presiden menandai berakhirnya masa Demokrasi Parlementer dan embrio bagi munculnya Demokrasi Terpimpin dan perkembangan demokrasi ini menunjukan adanya tokoh yang sentralistik yakni Soekarno. Usaha dalam upaya penyelamatan Negara dari ketidakstabilan kehidupan social politik serta keamanan yang terjadi pada masa itu, melalui Kepres RI No.150 Tahun 1959 atau Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kemunculan Dekrit ini dapat dilihat memiliki makna suatu langkah serta usaha dalam upaya mencari penyelesaian untuk dapat keluar dari sebuah kemacetan politik di Indonesia yang dilakukan dengan melalui proses membentuk konsep kepemimpinan dengan karakter tangguh dan kuat.

Permulaan pelaksanaan dari Demokrasi Terpimpin di Indonesia sudah tentu membawa perubahan serta pengaruh baru dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat serta kehidupan dalam kenegaraan. Indonesia yang pada periode-periode pemerintahan sebelumnya berupaya untuk dengan keras mempertahankan Kemerdekaan Indonesia namun pada periode pelaksanaan Demokrasi ini Indonesia semakin menunjukan taringnya dalam kancah Internasional melalui berbagai aktifitas yang diikutinya. Salah satu yang menjadi salah satu keberhasilan pada masa Demokrasi Terpimpin ialah pelaksanaan kegiatan dalam bidang keolahragaan yakni pelaksanaan Asian Games IV pada tahun 1962.

Keberhasilan Pelaksanaan kegiatan ini tentu didukung oleh pemerintah pada saat tersebut yang bertindak sebagai penyelenggaran dan tuan rumah dari semarak Asian Games ini. Menurut Huebner (2016) menyatakan bahwa Asian Games memperoleh pengakuan dari *International Olympic Committee* (IOC) sebagai sebuah kegiatan yang diikuti banyak negara dengan posisi dibawah setelah Olimpiade. Keberhasilan dalam

pelaksanaan ini tentu didorong dengan motivasi bangsa Indonesia yang sangat kuat. Sejalan dengan hal tersebut, Tifanny & Fuad (2019:203) menyatakan bahwa motivasi pemerintah pada periode penerapan Demokrasi Terpimpin ini dilatar belakangi oleh pemikiran Soekarno dengan pendapatnya yaitu apabila suatu negara berperan sebagai tuan rumah maka hal ini akan memberikan dampak bagi harkat, martabat serta kedudukan bangsa menjadi dterangkat dikancah dunia, bagi dirinya syarat dan pendanaan yang akan dibutuhkan untuk Asian Games yang ke-4 tidak menjadi masalah. Pemikiran yang demikian tentu telah diperhitungkan oleh Soekarno dan pemerintahnya, analisis yang dilakukanya tentu dapat kita pahami bahwa dengan menjadi ruan rumah acara tersebut akan memberi dampak dalam bidang politik, ekonomi, dan social budaya yang tentu dampak ini lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan yang dikeluarkan, sebab dimasa itu Indonesia masih memerlukan pengakuan serta legitimasi yang berasal dari Negara- Negara dibelahan dunia dalam kehidupan internasionalnya.

Pemikiran Soekarno yang demikian tentulah menjadi jalan baru dalam mendapatkan simpatisan dan legitimasi tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Black & Westhuizen (2004: 1194) yang menyatakan bahwa pelaksanaan dari suatu acara besar dengan perhelatan skala internasional seperti olahraga dengan kapasitas yang besar dapat memberikan pengalaman emosional tersendiri serta dapat menjadi jalan dalam menunjukkan daya tarik serta kekuatan impresi olahraga sebagai kekuatan politik. Jalan menjadi Tuan Rumah dalam pelaksanaan Asian Game IV ini sebenarnya dijalankan oleh Soekarno di tengah berbagai permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, meskipun dalam bidang olahraga ada dalam seluruh elemen masyarakat, namun olahraga belumlah menjadi suatu hal yang pokok pada periode tahun tersebut. Masyarakat masih mengalami berbagai kekurangan dalam kehiduapannya baik kebutuhan primer, skunder amupun tersier namun pada periode Demokrasi Terpimpin ini justru pemerintahan Soekarno menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah dari Asian Games yang ke-4 yang membutuhkan dana besar. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul **implementasi kebijakan pemerintah masa demokrasi terpimpin tahun 1962 dalam keberhasilan Asian Games IV.**

METODE

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Historis. Menurut Surjomihardjo (1979:13) menyatakan bahwa metode penelitian ini adalah sebuah proses yang dilakukan sebagai bentuk usaha atau langkah dalam melakukan pencarian, pengumpulan, pengujian, pemilihan, pemisahan serta kemudian melakukan penyajian fakta sejarah serta penafsiranya didalam sebuah susunan yang sistematis dan teratur. Dalam metode ini, dilakukan beberapa langkah-langkah. Menurut Notosusanto (1984 : 36) terdapat empat langkah yang digunakan yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Teknik Kepustakaan dan Literatur . Analisis dalam dalam penelitian ini menggunakan Teknik Analisa Data Kualitatif Deskriptif.

HASIL DAN DISKUSI

Perintisan dan Usaha Pengajuan oleh Pemerintah Terhadap Asian Games

Pelaksanaan Asian Games diawali dengan pembentukan organisasi yang menaunginya ditahun 1949 dengan nama Federasi Atletik Asia yang kemudian berubah menjadi Federasi Asian Games. Pelaksanaan kegiatan olahraga didalamnya

dilakukan setiap 4 Tahun sekali. Penyelenggaraan pertama dati Asian Game dilakukan pada tahun 1951 yang diawali dengan konferensi yang dilakukan di Istana Patiala New Delhi India pada 13 Februari 1949, didalam konferensi tersebut tokoh olahraga India, GD Sondhi menganggap perlu untuk adanya persatuan olahraga dengan anggota himpunan yakni seluruh anggota Negara yang berada dikawasan asia. Menurut Mithlesh (2007:3) ,menyatakan bahwa pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Negara lain seperti S. Ghulam Mohammad dari Afganistan, R. Yla dari Filipina , dalam pertemuan yang dihadiri oleh wakil yang berasal dari 9 negara memutuskan kesepakatan untuk melakukan penggantian dari nama nama Asian Amateur Athletic Federation atau AAAF berubah menjadi menjadi Asian Games Federation atau AGF. Berdasarkan hasil konferensi tersebut maka akhirnya dibukanlah untuk pertama kalinya Asia Games di New Delhi yang di buka oleh Presiden India yakni Presiden Rajendra Prasad yang dimulai sejak 4 Maret – 11 Maret 1951 yang diikuti oleh 11 Negara.

Pada awal pelaksanaan Asian Game yang pertama, kondisi Indonesia masih dalam suasana mempertahankan keutuhan NKRI dari sekutu, namun kebijakan pemerintah bukan hanya terfokus dalam permasalahan tersebut saja. Pemerintah juga tetap mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam berbagai bidang termasuk keolahragaan. Menurut Lutan (2012:1) yang menyatakan bahwa diawal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947 dilakukanlah pembentukan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) serta Sri Sultan Hamengkubuwono IX berperan sebagai ketuanya hingga mampu melaksanakan kegiatan PON pertama kalinya di Surakarta.

Partisipasi yang dilakukan melalui usaha pemerintah untuk terlibat secara langsung dalam Asian Games ini sudah mulai dirintis sejak Tahun 1951. Menurut Winanto, Soetopo (1958:15-20) menyatakan bahwa keinginan Indonesia agar dapat menjadi penyelenggara dari pelaksanaan tersebut sudah diupayakan pada perhelatan Asian Games Ke-I namun pemerintah pada saat tersebut belum memperoleh hasil yang diinginkan. Kegagalan Indonesia untuk menjadi tuan Asian Game Ke-II yang akan dilakukan pada Tahun 1954, pengajuan yang dilakukan Indonesia di Asian Game Ke-I dikarenakan para Negara yang tergabung dalam keanggotaan Asian Games belum memiliki keyakinan bahwa Indonesia mampu mensukseskan acara tersebut pada periode selanjutnya (Harsuki, 2004:343) , dan Negara yang menjadi angota tersebut cenderung memilih Filipina agar dapat melakukan penyelenggaraan Asian Game Ke-11 pada tahun 1954.

Upaya yang dilakukan Indonesia tidaklah berhenti begitu saja, keinginan Indonesia agar menjadi penyelenggara dalam pelaksanaan Asian Games juga tetap dilakukan pada periode Asian Game Ke-III. Keinginan untuk menjadi tuan rumah diusakan kembali ketika berlangsung siding AGF di Filipina yang bersamaan dengan Asian Games Ke- III. Menurut Rusli Lutan (2007:15) menyatakan bahwa pada pengajuan sebagai tuan rumah untuk Asian Games Ke-III yang akan dilaksanakan pada 1958 , keanggotaan AGF juga masih belum memiliki kepercayaan kepada Indonesia untuk dapat mensukseskan Asian Games seperti sebelum-sebelumnya dan pada akhirnya keanggotaan AGF memilih Jepang sebagai penyelenggara Asian Game Ke-III pada 1958.

Upaya perintisan yang dilakukan ini masih menemui kegagalan sebab melihat kondisi Indonesia pada periode ini masih belum terlalu stabil, masih banyak berbagai

urusan dan permasalahan dalam negeri yang perlu diselesaikan oleh pemerintah Indonesia sendiri pada periode 1950-1960an. Sebagai contoh saja dalam bidang ekonomi masih banyak perusahaan yang masih didominasi oleh pemilik Belanda (Yahya,1991:30), selain itu setelah memperoleh hasil KMB , Indonesia juga masih memiliki gangguan dari sisi keamanan dengan munculnya beberapa peristiwa seperti Angkatan Perang Ratu Adil bertepatan dengan 23 Januari 1950 melakukan serangan di Bandung, serta munculnya gerakan-gerakan seperti DI/TII.

Upaya Soekarno sebelum melalui Dekrit Presiden yang menjadi pembuka jalan dalam perombakan dalam penyusunan kegiatan pemerintahan secara menyeluruh, gagasan-gagasananya melalui dikumandangkan melalui konsepsi presiden juga diutarakan pada 21 Februari 1957 yang mengajukan pengusulan pemberhentian Kabinet Gotong Royong serta Dewan Nasional (Sekretariat Negara RI, 1985:107). Selain itu dalam konsepsi ini dia juga berkeinginan untuk dapat meninggalkan sistem liberal di Indonesia. Seluruh pengeluaran Dekrit Presiden, dalam upaya penyelesaian berbagai persoalan di Indonesia didakanlah Munas atau Musyawara Nasional di Jakarta pada 10 - 14 September 1957 dan sebagai bentuk kelanjutanya dilakukan Munap atau Musyawara Pembangunan pada 24 November 1957 hingga 4 Desember 1957. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan Munap tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menyuskan rencana menjadi tuan rumah Asian Games Ke-IV, sebab didalam munap ini pemerintah membahas mengenai pembangunan dalam keolahragaan. Usaha pemerintah mulai terlihat kemajuan terus menunjukkan kemajuan, hingga pada akhirnya pada 23 Mei 1958 pada sidang Asian Games Federation di Tokyo Jepang dengan memberikan keputusan bahwa Indonesia menjadi penyelenggara acara tersebut, dan hal ini berkorelasi dengan persiapan yang sudah dilakukan dari tahun 1958 hingga tahun 1963.

Menurut Frans Seda (1992:37-542) menyatakan bahwa kondisi Indonesia dalam posisi menjelang pelaksanaan Asian Game Ke-III di Jepang yang akan berlangsung mulai 24 Mei hingga 1 Juni 1958 belum menunjukkan arah kemajuan dan perbaikan yang berarti namun masih dalam keterpurukan dan penuh masalah, baik berkaitan dengan keamanan dan masalah politik yang belum selesai hingga permasalahan mengenai kinerja dari Konstituante yang diperoleh dari pemilu 1955 belum berhasil membuat UUD bagi NKRI, oleh sebab itu dengan munculnya Dekrit Presiden, 5 Juli 1959 dijadikan sebagai langkah sigap dan tegas dalam upaya penyelesaian serta mengakhiri pertentangan serta permasalahan politik yang terus mengancam dan menggoyahkan keutuhan bangsa serta Negara , dan disisi lain hal ini juga telah memberikan situasi serta kondisi yang lebih kondusif bagi bangsa Indonesia untuk berbenah dan mempersiapkan diri pada perhelatan Asian Game yang ke-IV pada saat itu di Indonesia

Menurut sudut pandang Organizing Committee Asian Games IV (1962: 13) memberikan pendapat bahwa tahun penting bagi Indonesia adalah tahun 1959 sebab dianggap sebagai Penemuan Revolusi Kita atau biasa yang dikenal dengan Rediscovery of Our Revolution yang bertujuan dalam melaksanakan pembangunan secara maksimal, signifikan, dan besar.

Upaya dalam mencapai tujuan nasional Indonesia yang berkeadilan dan kemakmuran, maka pemerintah juga terus melakukan pelaksanaan pembangunan

secara besar-besaran. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan menerapkan kebijakan Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Pelaksanaan perancangan terhadap pola yang dilakukan telah dijawi dengan ekonomi terpimpin, dengan dibentuknya Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada tahun 1959 yang kemudian dengan ketetapan presiden No.12 Tahun 1963 diubah namanya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 26 Oktober 1963. Badan ini akhirnya mampu melakukan penyelesaian pola pembangunan nasional pada 1961 yang kita kenal sebagai Rencana Pembangunan meliputi tahun pelaksanaan 1961 – 1969. Rencana ini juga dikenal dengan istilah Penasbede yang merupakan akronim dari Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun.

Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan

Kebijakan Penyediaan Fasilitas

Fasilitas baik sarana maupun prasarana merupakan hal yang sangat penting bagi pelaksanaan Asian Game Ke-IV pada tahun 1962, namun Indonesia belumlah memiliki kapasitas stadion yang memadai dengan taraf Internasional, Indonesia hanya memiliki Stadion IKADA atau yang biasa dikenal dengan Stadion Ikatan Atletik Djakarta yang memiliki standar hampir mendekati dan kelayakannya dapat dijadikan sebagai Stadion Pertandingan Asian Games yang memiliki kapasitas penonton sekitar 14.000-15.000 penonton. Pembangunan berbagai fasilitas tentunya harus memperhatikan akses dari pembangunan tersebut. Soekarno memiliki pilihan dan pandangan agar segala bentuk pembangunan yang berkaitan dengan penyedian fasilitas Asian Games ke-4 harus dekat dengan pusat kota yakni sekitar Thamrin maupun Menteng. Olehkarena itu Soekarno dan Frederik Silaban melakukan pantauan melalui halikopter untuk melihat wilayah Jakarta.

Kebijakan pemerintah dalam upaya penyediaan fasilitas yang pertama adalah melakukan pembebasan lahan serta pemindahan masyarakat, kebijakan ini dilakukan dengan mengeluarkan sebuah keputusan yakni Keputusan Penguasa Perang Pusat No. Kpts/ Peperpu / 01139/1959 bertepatan dengan 16 Desember Tahun 1959, Keputusan ini memiliki isi mengenai Penggunaan Penuh Tambahan Luas Bidang Tanah untuk Pekerjaan Persiapan dan Penyelenggaraan Asian Games 1962 di Jakarta. Melalui kebijakan ini maka tanah-tanah tersebut dijadikan sebagai pembangunan fasilitas seperti Stadion Gelora Bung Karno di Senayan, TVRI yang menjadi pionir pertelevision di Indonesia, Hotel Indonesia, Persimpangan Semanggi, Monumen Selamat Datang. Namun dilain sisi , pembangunan fasilitas sarana dan prasarana ini mendapat sorotan dari Hatta. Menurut Noer (1990) menyatakan bahwa dalam rencana pelaksanaan Asian Games Tahun 1962, ada keberatan dari Hatta, sebab Hatta memiliki pendapat bahwa kesiapan Indonesia belum lah matang, hal ini disebabkan karena Indonesia masih dalam keadaan ekonomi yang krisis dan memperhatikan, perkiraan yang Hatta dalam menyelenggarakannya harus siap pembiayaan sebesar tidak kurang dari Rp 5.000 Juta (Rp 5 Milyar). Belum ditambah dengan keperluan akomodasi bagi para peserta seperti Penginapan, sarana dan prasarana olahraga, transportasi dan lainnya.

Demokrasi terpimpin pada akhir tahun 1960 memiliki kebijakan yang menunjukan bahwa, MPRS melalui ketetapannya No. II / MPRS/ I960 bertepatan dengan tanggal 3 Desember 1960 melakukan penetapan terkait Garis-Garis Besar Pola

Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang kemudian Soekarno melakukan peresmiannya pada 1 Januari 1961 dengan melakukan pencakulan tanah pertama di wilayah Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Menurut Sekretariat Negara Republik Indonesia Vol. 2: 1950 – 1964 (36-48) dijelaskan bahwa pemerintah melakukan pembangunan berbagai fasilitas yang mendukung pelaksanaan Asian Game Tahun 1962 dengan secara berkala melakukan pembangunan beberapa bangunan seperti pada 8 Februari 1960 dilakukan pembangunan pertama kali wilayah Asian Game, yang kemudian secara bertahap pada tahun 1961 melakukan pembangunan seperti Monumen Nasional atau Monas, Pembangunan sarana ibadah berupa Masjid Istiqlal, Pembangunan tempat penginapan berupa Hotel Indonesia, serta melakukan pelebaran jalan seperti jalan yang ada di wilayah Gatot Subroto, MT Haryono, serta Thamrin sampai Sudirman. Pemerintah juga melakukan penyiapan untuk para wartawan dengan membangun Wisma Warta atau Pers House, Selain itu pembangunan yang dilakukan ialah pendukung penyebaran saluran informasi dengan mendirikan TVRI, dan untuk menyambut para orang-orang yang akan terlibat pada acara tersebut dibangunlah Tugu Selamat Datang di kompleks Bundaran HI.

Melalui perjalanan pembangunan serta kebijakan yang panjang, akhirnya pembangunan SU GBK diselesaikan pada Juli 1962. Pembangunan Fasilitas Indor akhirnya juga dapat terselesaikan pada 20 Mei 1961. Pembangunan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah dengan melakukan prosesi peresmian Stadion Renang pada bulan Desember 1961 yang kemudian disusul dengan Stadion Tenis. Memasuki Tahun 1962 tepatnya bulan Mei dilakukan peresmian Stadion Atletik. Peresmian pada gedung-gedung olahraga atau biasa dikenal Gedora maka menunjukkan telah selesaiya pembangunan fasilitas olahraga, oleh sebab itu maka pada akhir Mei 1962 dilakukan proses Pembangunan Perkampungan Internasional. Puncak dari telah selesaiya proses pembangunan ialah dengan ditandai prosesi Pembukaan stadion yang menjadi stadion utama Asian Game 1962 bertepatan dengan 21 Juli 1962 Pukul 17.00 WIB dan disiarkan secara langsung oleh televisi yakni TVR selaku televisi milik pemerintah.

Kebijakan Pemenuhan Dana Pelaksanaan

Pelaksanaan dan keberhasilan dari Asian Games IV tentu menghabiskan banyak dana serta pembiayaan. Indonesia sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan tersebut yang dilakukan pada 24 Agustus 1962 – 4 September 1962 membuat pemerintah melakukan beberapa kebijakan dalam pelaksanaan. Terkait pembiayaan, pemerintah berdasarkan pada Keputusan Presiden No. 239 Tahun 1960 bertepatan dengan tanggal 1962 maka untuk penyelenggaraan acara Asian Game 1962 dan penyelenggaraan tugas dari DAGI, badan pekerja, badan persiapan daerah badan yang membantu DAGI diserahkan dan dibebankan kedalam sebuah anggaran belanja yang dikenal dengan ABPA atau Anggaran Belanja Pemerintah Agung serta kepada BBPT atau Badan-Badan Pemerintah Tertinggi. Kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan juga ditujukan pada kelompok swasta dengan mengeluarkan Instruksi Penguasa Perang Tertinggi No. 2 Tahun 1960 bertepatan dengan 5 Maret Tahun 1960 yang berisi mengenai anjuran terhadap semua para badan-badan dengan kategori swasta agar dapat memberikan bantuan untuk persiapan, pelaksanaan dari Asian Game Tahun 1962 tersebut.

Namun hal tersebut juga ditambah dengan kemampuan Soekarno dalam melakukan sebuah konsep Manuver Diplomasi. Menurut Rusli Lutan (2007: 16) menyatakan bahwa Soekarno melakukan maneuver politik yang sangat hebat dengan melakukan pemanfaatan dukungan dari PKI, hal ini dilakukan dengan mengajukan proposal peminjaman kepada Uni Soviet dengan nilai peminjaman senilai 12,5 Juta Dollar Amerika yang ditujukan untuk melakukan pembangunan serta pelaksanaaan Asian Game Ke-IV seperti Stadion Utama, Sarana dan prasarana penunjang olahraga, wisma atlet serta komponen pendukung lainnya. Kedekatan soekarno pada masa Demokrasi terpimpin tidaklah terlepas dari konsep NASAKOM yang dicetuskanya serta manifestasi politik atau Manipol.

Manurut Aidit (1964:30) mengatakan bahwa Melaksanakan Manipol secara konsekuensi adalah Ajaran Nasakom yang merupakan singkatan dari Nasionalis, Agama, dan Komunis yang berasal dari ide Soekarno, hal ini tentu sangat dimanfaatkan secara baik oleh PKI sebab dari hal ini telah memiliki dan memperoleh bagian tempat menjadi unsur yang sah dalam kehidupan politik di Indonesia pada masa itu. NASAKOM yang terdiri dari 3 unsur tersebut telah menjadi pilar-pilar yang ada dalam Demokrasi terpimpin masa itu. Pilar pertama adalah golongan nasionalis dengan Indische Partij (IP), Pilar kedua adalah kelompok agamis dan Pilar ketiga adalah Marxisme dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurut Mastuti (2017:728) menyatakan bahwa bahwa Nasakom merupakan ideologi dan memiliki 3 fungsi yaitu pengimbang kekuatan politik, ideology dalam pemersatu bangsa serta menjaga posisi Soekarno agar tidak kudeta.

Pembangunan yang diberikan oleh Uni Soviet merupakan sebuah fakta terhadap penyelenggaraan Asian Game IV terutama berkaitan dengan persiapan pembangunan komplek GBK, hal ini dapat terjadi sebab ada pemicunya yakni adanya keikutsertaan dan campur tangan Amerika Serikat dalam persoalan Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat, Penyelesaian antara Indonesia Jepang oleh sebab itu maka Indonesia memalingkan mukanya dan memilih mengajukan bantuan kepada Pihau Uni Soviet. Eksistensi Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin juga terlihat ketika Asian Games Ke- IV belum selesai, Indonesia sudah melakukan perencanaan untuk membuat sebuah kegiatan pesta olahraga Internasional yang diberi nama sebagai Games of the New Emerging Forces (Ganefo). Sebagai bentuk tindakan berkelanjutan maka Indonesia melakukan pembangunan sarana pendukung berupa Pusat Perbelanjaan Modern Sarina, oleh karena itu pada saat tersebut Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan sebuah Inpres RI No. 6 Tahun 1962 bertepatan dengan 21 September 1962 yang telah disediakan pendanaan senilai US \$ 8.000.000 , dana ini merupakan dana yang diperoleh dari bantuan atau talangan Bank Indonesia dengan memberikan jaminan menggunakan hasil dari dana perang yang berasal dari Jepang.

Kebijakan Pelaksanaan Acara Asian Games

Asian Game Ke-IV yang dilakukan pertama kali di Indonesia sukses dilakukan pada 24 Agustus – 4 September 1962. Peresmian acara ini dilakukan pada hari Jumat dengan acara besar dan meriah pada Pukul 16.00 WIB. Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan acara ini diawali dengan sebuah Keputusan Presiden RI No.113 Tahun 1959 yang berisi mengenai pembentukan dari badan-badan yang dimaksudkan untuk penyelenggaraan Asian Games tersebut.

Kebijakan ini mengharuskan agar perencanaan, persiapan serta pelaksanaan dapat dilakukan secara sempurna. Menindaklanjuti dalam rencana kenegaraan maka perlu dibentuk sebuah organisasi yang terdiri dari tenaga ahli, dari seluruh masyarakat, pemerintah, maupun organisasi keolahragaan dalam penyelenggaraan Asian Game tersebut sebagai hajat besar bangsa Indonesia. Pemberitaan terkait pelaksanaan Asian Game Ke-IV dilakukan oleh macam-macam Media Cetak ,sebagai contoh yang dilakukan oleh Majalah Mimbar Indonesia, kebanyakan dari intensitas isi materi pemberitaan berupan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah baik dalam sisi panitian, penyelenggaraan, Tim Indonesia yang akan diturunkan dalam perlombaan, sarana dan prasarana yang siap digunakan. Presiden Soekarno juga dalam periode pelaksanaan Asian Game ini , beliau melakukan sebuah pidato Sukarno yang menjabat selaku Presiden RI bertepatan dengan peringatan pada HUT-RI yang ke -17 beliau melakukan pidato dengan judul A Year of Triumph atau disebut sebagai Tahun kemenangan. Dan pada 3 September 1962di Istana Merdeka Jakarta kembali memaparkan terkait rencana pelaksanaan Ganefo sebagai bentuk wadah kegiatan olahraga antar bangsa. Ganefo tampil sebagai tuga dan konribusi suci Indonesia daalam eksistensi danupaya pembentukan tatanan baru dalam pergaulan Internasional. Hingga akhirnya segala bentuk fasilitas sarana dan prasarana yang semula dijadikan sebagai keberhasilan Asian Game tersebut dijadikan fasilitas yang turut serta mensukseskan acara Ganefo yang dilakukan pada 10-22 November 1963 yang diikuti 51 Negara, jika dibandingkan dengan Asian Game pada tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan kenaikan dua kali lipat sebab pada penyelenggaraan Asian Game yang sudah berhasil dilakukan hanya diikut oleh 20 Negara.

Pemberlakuan segala fasilitas yang sudah digunakan untuk Asian Game menjadi fasilitas Ganefo tercermin dalam Instruksi Presiden RI No. 08 Tahun 1963 tanggal 18 Oktober 1963 berisi terkait intruksi yang ditujukan kepada menteri Olahraga yang merangkap sebagai Kepala Staf Presiden dengan bidang konsentrasi urusan mengenai Ganefo afar dapat melakukan tindakan-tindakan serta upaya dan usaha agar dapat mengerahkan kembali seluruh alat dan perlengkapan yang digunakan dalam Asia Game untuk digunakan kembali secara maksimal pada pelaksanaan Ganefo Pertama di Jakarta.selain itu juga berisi instruksi agar segenap instansi maupun badan Pemerintahan Sipil, Militer dan badan-badan lain agar dapat memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan oleh Menteri tersebut.

Dampak Penyelenggaraan Asian Games 1962 Peningkatan Kerjasama dan Relasi Internasional

Penyelenggaraan Asian Game yang dilakukan di Indonesia sebagai tuan rumah pada Thaun 1962 tentu menjadi sebuah jalan membangun relasi dengan Negara-negara lain. Kerjama yang terjalin semakin erat membuka hubungan diplomasi dan berbagai bidang lainnya. Sebagai contoh, dengan adanya pembangunan yang dilakukan di Indonesia baik dari sisi srana prasarana baik utama maupun mendukung membuka jalan bagi Negara-negara lain untuk dapat berinvestasi di Indonesia. Asian Game 1962 yang sukses dilaksanakan Indonesia sebagai tuan rumah menjadikan Indonesia dikenal sukses dalam menyelenggarakan Sport Mega Event, hal ini tentu

menggunakan kemampuan dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam politik internasional dengan negara lain yang ingin menjalin kerjasama maupun perjanjian dan dialog hingga menciptakan kepentingan yang diinginkan pada masing-masing pihak untuk mendapatkan keuntungan dalam berbagai kehidupan seperti Politik, Sosial, Ekonomi maupun meningkatkan nama baiknya di dunia internasional. Keuntungan tersebut merupakan hasil dari politik internasional yang diterapkan oleh kedua belah pihak. Menurut Holsti (1995:18-19) menyatakan bahwa politik internasional merupakan sebuah studi yang membahas terkait pola maupun tindakan suatu negara yang menunjukkan sebuah reaksi dari negar lain dan menjadi suatu wujud dari interaksi yang ada.

Eksistensi Indonesia Semakin Meningkat

Dampak yang diperoleh dari kesuksesan dari Asian Game Ke-IV tahun 1962 adalah eksistensi Indonesia semakin meningkat. Hal ini terjadi sebab Indonesia menunjukkan kesanggupanya dalam menyukseskan acara tersebut sehingga mendapat sorotan dunia, hal ini disebabkan sebagai sebuah Negara yang baru berumur 17 Tahun, sudah mampu menyelenggarakan acara sebesar Asian Game pada 24 Agustus - 4 September 1962, ditambah dengan acara internasional lainnya yang dilakukan setelah acara tersebut yakni Ganefo yang juga disukseskan oleh Indonesia pada 10 sampai dengan 22 November 1963 dengan peserta sebanyak 51 Negara yang tersebar dari 5 benua. Hal ini ditambah dengan Transformasi Jakarta yang berproses dari sebuah kampung menjadi kota kosmopolitan berskala internasional yang dilengkapi dengan bebagai Proyek infrastrukturnya maju dengan dibanggunya Stadion Utama Senayan (GBK), hotel modern pertama yakni Hotel Indonesia, jalan tol baru, serta pusat perbelanjaan seperti pusat perbelanjaan Sarina.Indonesi juga telah melakukan pembangunan berupa Menara TVRI atau Televisi Republik Indoneisa pada 24 Agustus 1962 sebagai embrio dan pionir televise pertama di Indonesia dengan tampilan hitam putih untuk menyiarkan secara langsung perhelatan akbar Asian Games Tahun 1962.

Pertumbuhan Olahraga Nasional

Kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Asian Games 1962 juga dikuti dengan kesuksesan pada perlombaan olahraga yang diikuti. Perhelatan ini menjadi sebuah batu loncatan yang berkontribusi besar bagi perubahan secara signifikan masyarakat Indonesia dalam segala bidang, mulai dari insfratuktur, politik dengan implementasi Demokrasi Terpimpin, maupun kemajuan dalam prestasi. Asian Game 1962 telah meninggalkan berbagai fasilitas yang hingga saat ini masih kita gunakan bersama seperti stadion GBK, Hotel Indonesia, Pusat perbelanjaan sarinah dan masih banyak lainnya. Melalui Asian Game tersebut, telah menjadi sebuah tolak ukur baru bangsa Indonesia dalam bidang olahraga Indonesia, dengan perolehan kesuksesan ganda yakni sukses sebagai penyelenggara dan sukses dari prestasi. Kesuksesan ini tentulah tidak terlepas dari peran pemerintah Indonesia pada periode penrapan Demokrasi Terpimpin, dari perhelatan tersebut Soekarno juga berpesan kepada atlet yang bertanding pada Tahun 1962 dengan pesan untuk mendidikasikan hidup untuk keharuman nama Indonesia. Pertumbuhan olahraga nasional ini dapat dilihat dengan prestasi yang didaptakn pada ajang tersebut, dimana Indonesia menempati Peringkat Ke-2 dengan total perolehan medali sebanyak 51 Medali yang terdistribusi dala 11 Medali Emas, 12 medali yang merupakan Medali Perak dan 28

Perunggu namun masih dibawah Jepang sebagai urutan ke-1 dan diatas Filipina sebagai urutan ke-3.

KESIMPULAN

Demokrasi Terpimpin menunjukkan pada masa itu Soekarno menjadi tokoh yang memiliki posisi sentral. Usaha dalam upaya penyelamatan Negara dari ketidakstabilan kehidupan social politik serta keamanan yang terjadi pada masa itu, melalui Keputusan Presiden RI No.150 Tahun 1959 yang disebut juga sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 . Kemunculan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi jalan baru bagi pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Salah satu yang menjadi salah satu keberhasilan pada masa Demokrasi Terpimpin ialah pelaksanaan kegiatan dalam bidang keolahragaan yakni pelaksanaan Asian Games yang ke -IV pada tahun 1962. Partisipasi yang dilakukan melalui usaha pemerintah untuk terlibat secara langsung dalam Asian Games ini sudah mulai dirintis sejak Tahun 1951, Indonesia sudah berkali-kali mengajukan kesanggupanya untuk menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Asian Games, namun selalu ditolak oleh AGF. Hingga pada akhirnya bertepatan dengan Asian Game Ke-III di Jepang yang berlangsung mula 24 Mei hingga 1 Juni 1958, Indonesia memperoleh izin untuk menjadi tuan rumah sebagai Penyelenggaran Asian Games Ke-IV pada tahun 1962.

Perizinan yang diperoleh oleh Pemerintah Indonesia tentu menyebabkan dalam pengeluaran kebijakan pemerintah Indonesia yang mengenaut Demokrasi Terpimpin dengan dikeluarkanya Dekris Presiden 5 Juli 1959. Beberapa implementasi kebijakan pemerintah masa Demokrasi Terpimpin tahun 1962 dalam keberhasilan Asian Games IV yaitu Kebijakan Penyediaan Fasilitas yang dilakukan pemerintah dengan Keputusan Pengusa Perang Pusat No. Kpts/ Peperpu / 01139/1959 bertepatan dengan 16 Desember 1959 yang memiliki isi keputusan berupa penguasaan penuh tambahan luas bidang tanah, hal ini dimaksudakan untuk persiapan dalam penyelenggaraan Asian Games tersebut. Selain itu, kebijakan yang diimplementasikan pemerintah juga dalam bentuk penerapan Garis-garis besar pola dalam pembangunan nasional semesta berencana dalam tahap pertama yakni periode Tahun 1961 sampai dengan Tahun 1969 yang sudah ditetapkan oleh MPRS pada 3 Desember 1960.

Kebijakan pemerintah lainnya ialah berkaitan dengan Pemenuhan Dana Pelaksanaan, kebijakan ini diimplementasikan dengan dikeluarkanya Keppres RI Nomor 239 Tahun 1960 bertepatan dengan 19 September 1960. Kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan juga ditujukan pada kelompok swasta dengan mengeluarkan Instruksi Pengusa Perang Tertinggi yang mengeluarkan intruksi dengan Nomor 2 Tahun 1960 yang bertepatan dengan 5 Maret 1960 tentang anjuran kepada lembaga swasta agar dapat mendukung penyelenggaraan Asian Games di Indonesia.Selain itu Soekarno Juga melakukan maneuver politik yang sangat hebat dengan melakukan pemanfaatan dukungan dari PKI, hal ini dilakukan dengan mengajukan proposal peminjaman kepada Uni Soviet sebesar 12,5 Juta Dollar AS.

Implementasi kebijakan pemerintah juga terlihat dengan dilakukabta kebijakan pelaksanaan acara Asian Games yaitu dengan Keputusan Presiden RI Nomor 113 Tahun 1959 dengan isi yang membahas mengenai proses pembentukan badan untuk penyelenggaraan Asian Games. Presiden juga mengeluarkan sebuah Instruksi dengan Nomor 08 Tahun 1963 tanggal 18 Oktober 1963 yang tujuan kepada mentri olahraga agar dapat mendayagunakan kembali fasilitas Asian Games untuk perhelatan Ganefo. Dampak Penyelenggaraan Asian Games 1962 sangatlah besar bagi bangsa Indonesia

diantaranya adalah Peningkatan Kerjasama dan Relasi Internasional, Eksistensi Indonesia Semakin Meningkat dan Pertumbuhan Olahraga Nasional. Melalui Asian Games tersebut, telah menjadi sebuah tolak ukur baru bangsa Indonesia dalam bidang olahraga Indonesia, dengan perolehan kesuksesan ganda yakni sukses sebagai penyelenggara dan sukses dari prestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggia Tiffany, Fuad Azm. (2019). Diplomasi Publik Indonesia melalui Penyelenggaraan Asian Games 2018. Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)*: 1 (3).
- Anwar Ilmar. (2018). Demokrasi Terpimpin Dalam Pemikiran Dan Praktik Politik. Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*.
- Arend Lijphart. (1995). *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Black, D. R., & Westhuizen, J. v. (2004). *The Neglected Allure of Global Games*. In Third World Quarterly, Going Global: The Promises and Pitfalls of Hosting Global Games.
- D.N. Aidit, Revolusi. (1964). *Angkatan Bersendjata dan Partai Komunis*. Jakarta. Jajasan Pembaruan.
- Frans Seda. (1992). "Munap dan Pembangunan", *Penabur*, 19 dan 20 Desember 1957, dalam *Simfoni Tanpa Henti, Ekonomi Politik Masyarakat Baru Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Harsuki., dkk. (2004). *Olahraga Indonesia dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Olahraga, Kementerian Pendidikan Nasional.
- Huebner, S. (2016). *Pan-Asian Sports and the Emergence of Modern Asia*. Singapura NUS Press.
- I Ketut Suradjaja. (1984). *Hubungan Indonesia – Jepang*. Jakarta. PT Karya Unipress.
- K.J.Holsti. (1995). *Internasional Politics (ed.8)*, University of British Columbia. US : Prentice-Hall, Inc.
- Keputusan Penguasa Perang Pusat No. Kpts/ Peperpu / 01139/1959 tanggal 16 Desember 1959
- Majalah Mimbar Indonesia., No. 8, Thn. ke XVI, Agustus 1962., hlm. 4 – 5.
- Mastuti sri P. 2017. Nasakom Sebagai Ideologi Negara Tahun 1959-1965 . Jurusan Pendidikan Sejarah Fakutas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 5, No. 3, Oktober 2017
- Mimbar Indonesia., No. 5/6, Thn. ke XVI, Juni 1962., hlm. 18 – 19
- Mithlesh K. Singh Sisodia. (2017). "India and the Asian Games: From Infancy to Maturity", *kumpulan artikel dalam: Sport, Nationalism and Orientalism the Asian Games*. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Noer, Deliar. (1990). *Muhammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta. LP3ES.
- Rusadi Kartaprawira. (1977). *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Bandung. Sinar Baru.
- Rusli Lutan. (2007). *Indonesia and the Asian Games: Sport, Nationalism and the "New Order" artikel dalam: Sport, Nationalism and Orientalism the Asian Games*. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

Sekretariat Negara Republik Indonesia., Dari Gelora Bung Karno ke Gelora Bung Karno Vol. 2: 1950 – 196436 – 48

Soegiarso Soerojo. (1988). *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, G30S-PKI dan Peran Bung Karno*. Jakarta. PT. Intermas

Suhaemi. (1993). *Ganefo Sebagai Alat Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin*. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Wienakto dan Soetopo. (1958). *Kisah-Kisah Asian Games*. Jakarta. PT. Mustrivo.

Yahya A. Muhamimin. (1991). *Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950 – 1980*. Jakarta: LP3ES.